

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan dilakukan untuk pembangunan nasional yang merata ke setiap daerah yang masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan daerahnya (Azzumar, 2011). Pola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi desentralisasi atau memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Menurut penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Pembangunan ekonomi daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat, meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja bagi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggara otonomi daerah atau kemandirian suatu daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian, memiliki tingkat PAD yang lebih tinggi

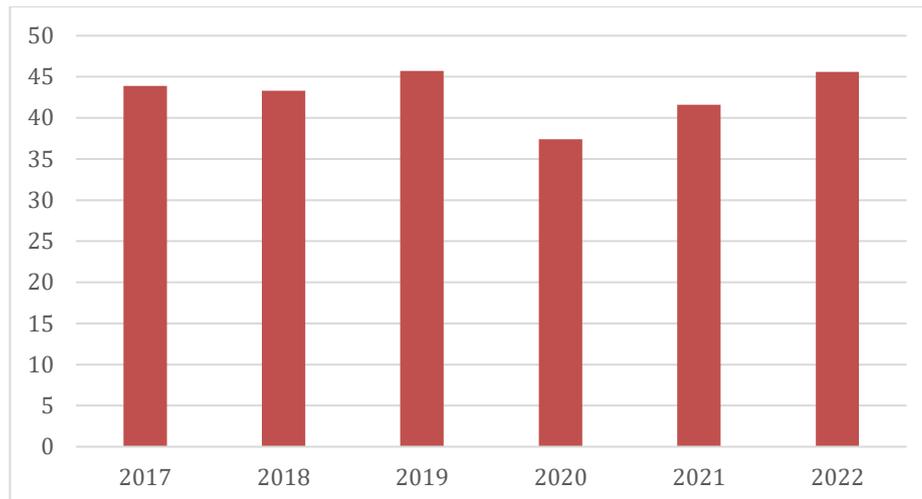
dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri (Gusliana & Yuniara, 2020). Hal ini berarti pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Dapat dilihat pada sisi tingkat kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 277%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 188%. Dimana intervensi pemerintah pusat tidak ada karena masih dalam kisaran 75%-100%, yang artinya daerah dianggap benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah (Amal & Wibowo, 2022).

Di Provinsi DKI Jakarta, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sebelum COVID-19, PAD Jakarta menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup kuat dengan kontribusi berasal dari pajak hotel, restoran, dan pajak kendaraan bermotor (BPS, 2024). Pendapatan dari sektor-sektor tersebut memberikan dukungan signifikan terhadap total PAD, berkat aktivitas ekonomi yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang intens.

Namun setelah COVID-19, terdapat perubahan drastis dalam struktur dan jumlah PAD. Pandemi mengakibatkan penurunan besar dalam pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Realisasi PAD setelah Covid-19 juga menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan, banyak target anggaran tidak tercapai karena penurunan pendapatan. Maka dari itu,

perlu adanya optimalisasi PAD dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Di bawah ini merupakan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam enam tahun terakhir.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah, diolah

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022
(Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa nilai pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 PAD sebesar 43,9 juta rupiah lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 43 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat sebesar 45,7 juta rupiah, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 37 juta rupiah. Penyebab penurunan pada tahun 2020 adalah Covid-19 yang mewajibkan Pemprov melakukan penyesuaian anggarannya dan mengubah APBD. Posisi PAD mengalami kontraksi karena pada masa pandemi kegiatan ekonomi terhambat oleh terbatasnya jumlah kegiatan dan mengakibatkan jumlah pendapatan tidak optimal

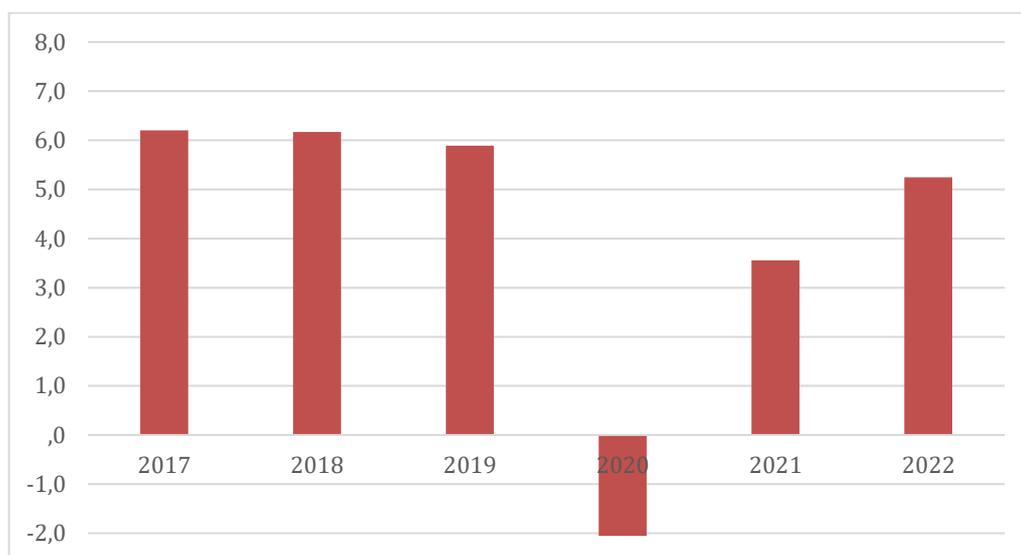
(Amal & Wibowo, 2022). Selanjutnya dari tahun 2020 mengalami kenaikan hingga tahun 2022 yang memiliki realisasi PAD sebesar 45,6 juta rupiah.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB ini merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan juga memperlihatkan struktur perekonomian regional.

Pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi barang dan jasa adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian sebuah daerah dari sektor ekonomi primer ke sektor ekonomi sekunder dan tersier yang dinamis dan berimbang. Pertumbuhan juga berfungsi sebagai kekuatan utama pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Namun demikian, perlu diketahui bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari gejolak ekonomi global. Selain itu kekacauan ekonomi global akan berdampak pada ekonomi suatu negara termasuk wilayahnya, dalam sistem ekonomi yang terbuka.

Menurut Desmawati, et.al., (2015) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi

efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PAD atau pertumbuhan ekonomi sudah menyebar di sektor ekonomi yang merupakan sumber penerimaan PAD. Dalam penelitian Ms (2017) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi atau PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.2

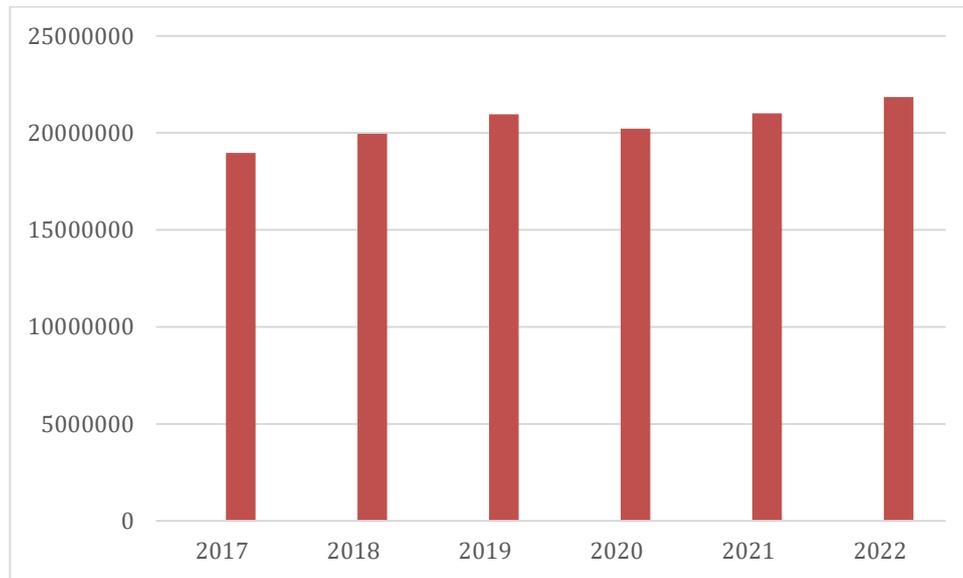
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 (%)

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -2,39%. Penurunan terjadi akibat dampak dari Covid-19, hal ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di Jakarta, terutama di sektor-sektor seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata yang sangat penting bagi ekonomi Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi pelan-pelan mengalami kenaikan hingga tahun 2022.

Di dalam pasal 1 angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik dengan roda dua atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke dalam penerimaan pajak daerah provinsi dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling sedikit 10% dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah provinsi harus dialokasikan untuk pemerintah daerah kab/kota untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum (Rahman & Restiatun, 2023).

Menurut Rahman dan Restiatun (2023) jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat. Sejalan dengan penelitian Ilham (2022) menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.3

Jumlah kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 (Unit)

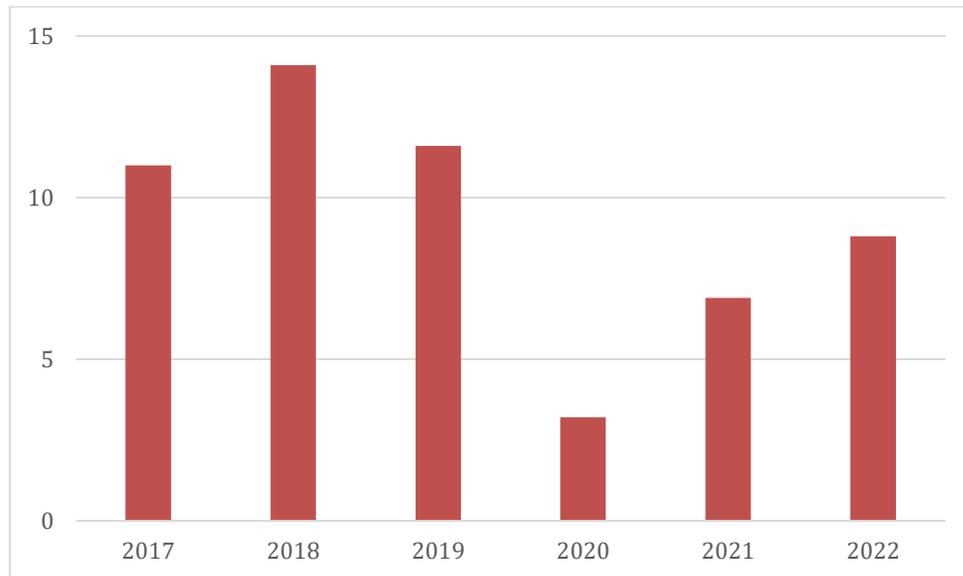
Berdasarkan gambar 1.3 jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2017-2022 cenderung meningkat, namun tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadinya COVID-19. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor yaitu sebanyak 18.967.738 unit lalu tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 19.962.778 unit. Kemudian tahun 2019 berjumlah 20.965.708 unit lalu dari 2020-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi kendaraan bermotor yang berikutnya akan berdampak pada peningkatan PAD.

Namun disisi lain, Jakarta identik dengan kemacetan, yang mana dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan kemacetan yang semakin parah. Dengan hal itu pemerintah DKI Jakarta mempunyai strategi yang telah digunakan dan sedang dipertimbangkan yaitu sistem pengelolaan parkir yang

efektif dan efisien, pembatasan usia kendaraan, penggunaan transportasi umum, pengendalian lalu lintas elektronik dan lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud dan mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Menurut Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja modal adalah seluruh belanja pemerintah daerah yang mencakup dua jenis belanja yakni bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan yang akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah seperti biaya pemeliharaan pada kelompok administrasi umum yang bagian dari belanja yang bersifat rutin dimana manfaatnya melebihi satu anggaran.

Belanja modal merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan pendapatan asli suatu daerah. Darwanis dan Saputra (2014) menyebutkan pada penelitiannya ada pengaruh positif belanja modal terhadap PAD yang disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah maka masyarakat dapat menikmati untuk menjalankan produktivitas pekerjaannya sehingga masyarakat akan membayar pajak dan retribusi dalam menikmati infrastruktur yang akan meningkatkan PAD.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.4

Realisasi Belanja Modal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 realisasi belanja modal Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal sebesar 11 juta rupiah, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,1 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11 juta rupiah, namun pada tahun 2020 realisasi belanja modal mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 3.1 juta rupiah. Kemudian dari tahun 2020-2022 realisasi belanja modal mengalami kenaikan. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan *lockdown* dan pembatasan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor ekonomi, termasuk pajak dan retribusi. Hal ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk belanja modal.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan tentang indikator yang memengaruhi pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Kebaruan dari penelitian ini yakni adanya pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama periode kurun waktu 14 tahun yakni tahun 2009-2022, karena variabel jumlah kendaraan belum banyak yang meneliti. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, berikut identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2022?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi bagi yang hendak melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor dan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan-kebijakan yang diambil dengan tepat dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder yang setiap data variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama sebelas bulan dengan alokasi waktu seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024																								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags				Sep				Okt				Nov				Des		
1	Pengajuan Judul	■																								
2	Pengumpulan Data Usulan Penelitian		■	■	■																					
3	Penyusunan Usulan Penelitian					■	■	■																		
4	Seminar Usulan Penelitian								■																	
5	Revisi Usulan Penelitian									■	■	■	■	■												
6	Analisis Data													■	■											
7	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	■						
8	Sidang Skripsi																				■					
9	Revisi Skripsi																					■	■	■	■	■